



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIKN BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TANGERANG II**

LAPORAN KEUANGAN

**Periode yang berakhir
31 Desember 2025
(Audited)**



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 (Audited)

*Jalan TMP. Taruna, Sukaasih
Kota Tangerang 15111
Banten*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Tangerang II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Tangerang II. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tangerang, 4 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Diki Zenal Abidin

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	19
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	24
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
F. Pengungkapan Penting Lainnya	28

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II

Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Tangerang 15111
Telepon : (021) 55771197, 55771198; Surel: kpknl.tangerang2@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPKNL Tangerang II yang terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang, 3 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Diki Zenal Abidin

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPKNL Tangerang II Audited TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp34,343,730,587 atau mencapai 142.3 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp24,134,176,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,929,409,975 atau mencapai 98.07 persen dari alokasi Pagu Netto anggaran sebesar Rp2,987,049,000 atau 30.65 persen dari Pagu total Rp9,557,327,000 (terdapat blokir anggaran).

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp10,611,306,187 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3,161,877,727, Aset Tetap (neto) sebesar Rp7,449,428,460, dan aset lainnya Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3,007,989,084 dan Rp7,603,317,103.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34,300,614,335, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3,299,701,877, sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp31,000,912,458. Terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp149,041,000, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp31,149,953,458.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 7,476,619,481 ditambah Surplus-LO sebesar Rp31,149,953,458, dikurangi transaksi antar entitas senilai (Rp31,023,255,836), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp7,603,317,103.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPKNL TANGERANG II LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2025		% terhadap anggaran	TA 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	24,134,176,000	34,343,730,587	142.3	19,380,801,651
JUMLAH PENDAPATAN		24,134,176,000	34,343,730,587		19,380,801,651
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
BELANJA BARANG	B.3	3,133,637,000	2,832,652,318	90.4	2,676,495,552
JUMLAH BELANJA OPERASI		3,133,637,000	2,832,652,318	90.4	2,676,495,552
BELANJA MODAL					
BELANJA PERALATAN DAN MESIN	B.4	199,590,000	96,757,657	48	640,318,191
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	B.5	6,224,100,000	0	0	299,987,400
JUMLAH BELANJA MODAL		6,423,690,000	0	0	940,305,591
JUMLAH BELANJA		9,557,327,000	2,929,409,975	30.65	3,616,801,143

II. NERACA

KPKNL TANGERANG II NERACA PER 30 DESEMBER 2025 DAN 30 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
KAS DI BENDAHARA	C.1	0	0
PENGELUARAN			
KAS DI BENDAHARA	C.2	0	0
PENERIMAAN			
KAS LAINNYA SETARA KAS	C.3	3,006,719,084	633,891,869
PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	C.4	106,949,060	1,024,312
PERSEDIAAN	C.5	48,209,583	28,541,009
JUMLAH ASET LANCAR		3,161,877,727	663,457,190
ASET TETAP			
TANAH	C.6	1,650,781,000	1,650,781,000
PERALATAN DAN MESIN	C.7	5,494,999,638	5,269,680,072
GEDUNG DAN BANGUNAN	C.8	6,885,443,170	6,885,443,170
ASET TETAP LAINNYA	C.9	33,200,000	33,200,000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.10	(6,614,995,348)	(6,110,531,435)
JUMLAH ASET TETAP		7,449,428,460	7,462,442,701
ASET LAINNYA			
ASET LAIN-LAIN	C.11	17,819,750	12,935,000
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI			
ASET LAINNYA	C.12	(17,819,750)	(11,117,500)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		10,611,306,187	8,125,899,891
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
UTANG PADA PIHAK KETIGA	C.13	3,007,989,084	649,280,410
UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN	C.14	0	0
UANG MUKA DARI KPPN	C.15	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		3,007,989,084	649,280,410
EKUITAS			
EKUITAS	C.16	0	7,476,619,481
JUMLAH EKUITAS		7,603,317,103	7,476,619,481
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10,611,306,187	8,125,899,891

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KPKNL TANGERANG II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 30 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	34,300,614,335	19,231,738,910
JUMLAH PENDAPATAN		34,300,614,335	19,231,738,910
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	29,561,276	36,243,232
Beban Barang dan Jasa	D.3	1,682,310,626	1,705,925,417
Beban Pemeliharaan	D.4	583,320,809	526,151,785
Beban Perjalanan Dinas	D.5	517,591,033	393,770,501
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	486,918,133	727,633,801
JUMLAH BEBAN		3,299,701,877	3,389,724,736
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		31,000,912,458	15,842,014,174
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	D.7		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	149,041,000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		0	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		31,149,953,458	0
POS LUAR BIASA			
Beban luar biasa	D.9	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		31,149,953,458	15,842,014,174

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPKNL TANGERANG II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
Ekuitas Awal	E.1	7,476,619,481	7,362,162,065
Surplus/Defisit LO	E.2	31,149,953,458	15,842,014,174
Koreksi nilai tahun berjalan	E.3	0	0
Transaksi antar entitas	E.4	(31,023,255,836)	(15,727,556,758)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		126,697,622	114,457,416
Ekuitas Akhir	E.5	7,603,317,103	7,476,619,481

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan realitis per tahun sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Adapun rencana strategis tersebut adalah untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan tertib administrasi urusan kepegawaian dan keuangan.

Dasar Hukum Entitas
dan
Rencana Strategis

2. Mewujudkan tertib administrasi urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan;
4. Melaksanakan Inventarisasi dan penilaian BMN sesuai target secara berkesinambungan;
5. *Collecting* data kekayaan negara;
6. Meningkatkan penyelesaian Piutang Negara;
7. Melakukan penataan sistem administrasi dalam pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Meningkatkan citra lelang yang mampu memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa lelang;
9. Menyempurnakan sistem administrasi dan informasi dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, serta penanganan masalah hukum;
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan.

*Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan AUDITED TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Tangerang II. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang saat ini menjadi SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang saat ini menjadi SAKTI Modul BMN. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Tangerang II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Tangerang II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan AUDITED TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca di kalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

AsetLainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa

Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan MasaManfaatAsetTetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp34,343,730,587

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34,343,730,587 atau 142.3% dari estimasi anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp24,134,176,000. Pendapatan di lingkup KPKNL Tangerang II berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan dari Bea Lelang oleh KPKNL Tangerang II, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Jasa Giro, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pemindahtanganan BMN Lainnya.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Negara
Rp2,832,652,318

Realisasi Belanja instansi pada periode Audited TA 2025 adalah sebesar Rp2,832,652,318 atau 90.4% dari anggaran belanja sebesar Rp9,442,092,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang (netto)	2.887.254.000	2.832.652.318	98,11%
Belanja Modal (netto)	99.795.000	96.757.657	96,96%
Total Belanja	2.987.049.000	2.929.409.975	98,07%

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Belanja Barang	2.832.652.318	2.676.495.552	5,83%
Belanja Modal	96.757.657	940.305.591	-89,71%
Total Belanja	2.929.409.975	3.616.801.143	-19,01%

Secara garis besar pada TA 2025 terjadi kenaikan belanja sekitar 5.83% dibandingkan dengan periode TA 2024. Hal ini terjadi karena terdapat pembukaan blokir anggaran di periode triwulan IV pada belanja barang dan sebagian pada belanja modal TA 2025 yang sebelumnya tidak terdapat pada TA 2024.

*Belanja Barang
Rp2,832,652,318*

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2025 sebesar Rp2,832,652,318 atau mengalami kenaikan sebesar 5.83% dibandingkan periode yang sama pada TA 2024, yaitu sebesar Rp2,676,495,552 disebabkan adanya pembukaan blokir anggaran.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp96,757,657*

B.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 adalah sebesar Rp96,757,657 terjadi penurunan 89,7% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp940,305,591. Terdapat pembukaan blokir anggaran pada Triwulan IV TA 2025 sejumlah Rp99,795,000 pada Belanja Modal Peralatan dan mesin untuk TA 2025 yang terdiri dari AC Split 2PK, Meja Kerja Kayu, Distance Meter, Alat Penghancur Kertas, dan Locker.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 adalah sebesar Rp0 terjadi penurunan sekitar 100% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp299,987,400. Terdapat blokir anggaran 100% dari Pagu awal sejumlah Rp6,224,100,000 pada Belanja Modal Peralatan dan mesin untuk TA 2025 berupa Pembelian 4 unit Rumah Negara Gol. II Tipe D.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Saldo tersebut merupakan Uang Persediaan yang berasal dari KPPN dan sisanya sudah disetorkan kembali ke negara.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Saldo tersebut merupakan PNPB Biaya Lelang dan Biaya Administrasi Piutang Negara yang sudah disetorkan ke Kas Negara pada Bulan Desember 2025.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp3,006,719,084*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3,006,719,084 dan Rp633,891,869.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum diserahkan kepada pihak ketiga berupa saldo rekening di bank. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Pajak Penghasilan terkait Lelang	-
2	Hasil Bersih Lelang	-
2	Hak Penyerah Piutang yang belum dipindahbukukan	70.010
3	Uang Jaminan Lelang yang belum diambil	2.929.743.500
4	Lain-lain Piutang Negara	24.000
5	Lain-lain Lelang	8.395.475
6	Dalam Proses Identifikasi	68.486.099
Jumlah		3.006.719.084

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp106,949,060*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp106,949,060 dan Rp1,024,312. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak negara yang masih harus diterima namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

masih belum diterima. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Bea Lelang Penjual dan Pembeli yang disetor pada bulan berikutnya.

Persediaan
Rp48,209,583

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp48,209,583 dan Rp28,541,009.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Tanah
Rp1.650.781.000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup KPKNL Tangerang II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1,650,781,000. Adapun rincian saldo Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap berupa Tanah

No	Jenis	KIB	Luas	Nilai (Rp)
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2010101004	943 m2	1,038,348,000
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2010101004	300m2	612,433,000
Jumlah				1,650,781,000

Peralatan dan
Mesin
Rp5,494,999,638

C.7 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5,494,999,638 dan Rp5,269,680,072.

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa: Belanja Modal berupa 3 unit AC Split, 3 unit Meja Kerja Kayu, 1 unit distance meter, 1 unit penghancur kertas, dan 4 unit locker, serta terdapat transfer masuk sebanyak 4 unit pengeras suara dari kantor pusat DJKN.

Gedung dan
Bangunan
Rp6,885,443,170

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan di lingkup KPKNL Tangerang II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6,885,443,170 dan Rp6,885,443,170.

Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	KIB	Jml Unit	Nilai
Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	1	Rp 5.488.040.000
Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	4010104999	1	Rp 65.813.000
Bangunan Parkir Terbuka Permanen	4010133001	2	Rp 41.163.100
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	4010201007	1	Rp 182.806.000
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	4010201010	1	Rp 130.576.000
Rumah Negara dalam proses penggolongan B	4010134002	1	Rp 637.128.670
Rumah Negara dalam proses penggolongan C	4040104003	1	Rp 339.916.400
Jumlah			Rp 6.885.443.170

Aset Tetap Lainnya
Rp33,200,000

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp33,200,000. Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	KIB	Jml Unit	Nilai
Buku Lainnya	6010101999	1	Rp 4.400.000
Bahan Kartografi Lainnya	6010101999	40	Rp 4.400.000
Lukisan Kanvas	6010303001	4	Rp 24.400.000
Jumlah			Rp 33.200.000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp6,614,995,348)

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp6,614,995,348) dan (Rp6,110,531,435).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan & Mesin	5.494.999.638	4.545.813.417	949.186.221
2.	Gd. & Bangunan	6.885.443.170	2.069.181.931	4.816.261.239
Jumlah		12.380.442.808	6.614.995.348	5.765.447.460

*Aset Lain-lain
Rp17,819,750*

C.11 Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah aset yang berasal dari penghentian penggunaan peralatan dan mesin yang sudah rusak berat atau tidak terpakai, nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17,819,750 dan Rp12,935,000.

*Akumulasi
Penyusutan/Amortis
asi Aset Lainnya
(Rp17,819,750)*

C.12 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp17,819,750) dan (Rp12,935,000).

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp3,007,989,084*

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3,007,989,084 dan Rp649,280,410. Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) serta kewajiban lain yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian dari utang tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Hasil Bersih Lelang	-
2	Hak Penyerah Piutang yang belum dipindahbukukan	70.010
3	Uang Jaminan Lelang yang belum diambil	2.929.743.500
4	Lain-lain Piutang Negara	24.000
5	Lain-lain Lelang	8.395.475
6	Dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	68.486.099
7	Belanja yang Masih Harus Dibayar	1.270.000
Jumlah		3.007.989.084

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0*

C.14 Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 yang merupakan Surat Perintah Bayar yang belum dipertanggungjawabkan kepada KPPN.

*Uang Muka Dari
KPPN Rp0*

C.15 Uang Muka Dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 yang merupakan Uang Persediaan Tunai dan Bank dari KPPN Tangerang.

*Ekuitas
Rp7,603,317,103*

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,603,317,103 dan Rp7,476,619,481. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp34,300,614,335

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34,300,614,335 mengalami penurunan dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp19,231,738,910. Pendapatan tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Pejabat Lelang Kelas I	31.763.688.012
2	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.481.537.885
3	Pendapatan BiAd Piutang Negara	47.576.597
4	Pendapatan Anggaran Lain-lain	7.811.841
Jumlah Total		34.300.614.335

Beban Persediaan
Rp29,561,276

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA Tahun 2025 adalah sebesar Rp29,561,276 turun 18% dari TA 2024 sebesar Rp36,243,232. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan
Jasa
Rp1,682,310,626

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,682,310,626 dan Rp1, 705,925,417. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban
Pemeliharaan
Rp583,320,809

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp583,320,809 dan Rp526,151,785. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pml. Gd. dan Bangunan	251.722.636
2	Beban Pml. Gd. dan Bangunan Lainnya	3.592.220
3	Beban Pml. Peralatan dan Mesin	328.005.953
Jumlah Total		583.320.809

Beban Perjalanan
Dinas
Rp517,591,033

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp517,591,033 dan Rp393,770,501 terjadi penurunan disebabkan adanya efisiensi anggaran .

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Perjalanan Dinas Biasa	463.731.033
2	Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.860.000
Jumlah Total		517.591.033

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp486,918,133*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp486,918,133 dan Rp727,633,801. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	358.576.725
2	Beban Penyusutan Gd. Dan Bangunan	128.341.408
Jumlah Total		486.918.133

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp149,041,000*

D.8 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 20 September 2024 adalah Rp149,041,000 dan Rp0.

Surplus ini berasal dari pendapatan pelepasan aset berupa penjualan peralatan dan mesin.

No	Uraian	Jumlah
1	Penjualan Roda 4	61.387.000
2	Penjualan Roda 4	82.023.000
3	Penjualan Inventaris Kantor	5.631.000
Jumlah Total		149.041.000

Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Saldo Pos Luar Biasa untuk TA 2025 dan 2024 adalah Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
Rp7,476,619,481*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,476,619,481 dan Rp7,362,162,065. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.

*Surplus(defisit) LO
Rp31,149,953,458*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah surplus sebesar Rp31,149,953,458 dan Rp15,842,014,174. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi Nilai Tahun
Berjalan Rp0*

E.3 Koreksi Nilai Tahun Berjalan

Jumlah Koreksi nilai tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat koreksi nilai tahun berjalan pada TA 2025 dan TA 2024.

*Transaksi Antar
Entitas
(Rp31,023,255,836)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp31,023,255,836) dan (Rp15,727,556,758).

*Ekuitas Akhir
Rp7,603,317,103*

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,603,317,103 dan Rp7,476,619,481.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Pengungkapan Kinerja

Nilai IKPA KPKNL Tangerang II pada TA 2025 adalah 100.

F.2 Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Keuangan

Pada tahun 2025, susunan Pejabat Pengelola Keuangan di lingkup KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:

Jabatan	Semula	Menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran	Diki Zenal Abidin	Diki Zenal Abidin
Pejabat Pembuat Komitmen	Bagus Hadi Prawibowo	Bagus Hadi Prawibowo
Pejabat Penandatangan SPM	Gunarto Yudho	Gunarto Yudho
Bendahara	Ahmad Firmansyah	Ahmad Firmansyah

F.3 Perubahan Peraturan dan Kebijakan terkait Keuangan

Terdapat beberapa kebijakan anggaran pada TA 2025 sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
2. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-27/PB/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah;
3. Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025;

F.4 Laporan Capaian Program Prioritas Nasional

INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA KPKNL TANGERANG II TA 2025							
Unit Satker		: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II (506194)					
Fungsi		: 01 Pelayanan Umum					
Subfungsi		: 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri					
No	Kegiatan Rincian Output Strategis	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Rincian Output
1	4798.UAE.201	7.034.000	6.979.000	99,22%	98	151	154,08%